KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL

1721-B1

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		H.1 NOMOR : 2 0 0 0 0 0 0 3 1 8			H.4 X	Final	
		H.2 X Pembetulan Ke- 0 H.3 Pembatalan			н.5	Tidak Final	
A. IDENTITAS PENERIMA PENGI	IASILAN YA	ANG DIPOTONG			<u> </u>		
A.1 NPWP : 1 4	3 5 6	9 3 6 6 7	2 2 0 0 0				
A.2 NIK :							
A.3 Nama : DENNY JI	EFFRY ROT	INSULU					
B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTO	NG						
MASA PAJAK (mm-yyyy)	I ROBE OBOEK I MOMIN		DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)	
B.1 B.2		B.3	B.4	B.5	B.6	B.7	
2 21-402-01		23.282.700	23.282.700	0	15	3.492.405	
B.8 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen 16 Nama Dokumen Faktur Pajak Tanggal 2 3 dd 0 2 mm 2 0 2 2 yyyy B.9 PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB. Nomor : Tanggal dd mm yyyyy B.10 PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan : B.11 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :							
C.1 NPWP Instansi Pemerintah	: 9	5 3 3 5 0	162722	0 0 0			
C.2 Nama Instansi Pemerintah	: RI	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR					
C.3 ID Subunit Organisasi	:		\Box				
C.4 Tanggal	: 2	3 dd 0 2 mm	2 0 2 2 yyyy			_	
C.5 Nama Penandatangan	: <u>H</u> A	ARI JUMADI					
C.6 Pernyataan Wajib Pajak		Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik.					
		suai dengan ketentuan yang ektronik sehingga tidak diperl	berlaku, Direktorat Jenderal Pajał ukan tanda tangan.	r mengatur bahwa d	dokumen ini tela	ah ditandatangani secara	
P4Z1JAQO							